

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA

TRIWULAN I TAHUN 2021





BADAN POM

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN I TAHUN 2021

SAMBUTAN KEPALA BPOM RI

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmad dan RidhoNya sehingga BPOM dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat melalui jaminan obat dan makanan yang aman, berkualitas/bermanfaat, dan bermutu. Kinerja BPOM sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 dituangkan dalam “**Kinerja BPOM Dalam Angka**”. Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil - hasil Pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam buku ini disampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan baik yang dilakukan BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan yang mencakup standardisasi, evaluasi *pre-market*, hingga pengawasan *post-market* yang disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Hingga tahun 2021 pandemi COVID 19 masih melanda dunia. Hal tersebut benar benar mengubah hampir seluruh tatanan kehidupan dan kebiasaan kita. Tidak terkecuali juga dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2021, beberapa kinerja yang telah dicapai Badan POM diantaranya adalah penerbitan 39.011 NIE, pemeriksaan di 4.994 sarana produksi dan sarana distribusi, pengujian 10.898 sampel, 40 perkara, dan 8 kegiatan pelaksanaan KIE.

Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM serta mitra kerja atas kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan I Tahun 2021. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua mitra kerja BPOM sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.

Jakarta, 18 Juni 2021
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP



DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BPOM R.I	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
HIGHLIGHT	1
HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	4
I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat dan Mutu Produk Obat dan Makanan	5
II. Hasil Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan	10
III. Standardisasi	10
IV. Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan	12
V. Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat.....	12
VI. Digitalisasi Pelayanan Publik.....	17
VII. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.....	18
VIII. Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi..	19
IX. Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum).....	21
X. Kerjasama Internasional	22
XI. Pengelolaan Anggaran	23
XII. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM	23
PENUTUP	23
LAMPIRAN	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Profil Registrasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2021	5
Gambar 2.	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/ Dipublikasikan s.d. Triwulan I Tahun 2021	5
Gambar 3.	Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2021	6
Gambar 4.	Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2021	6
Gambar 5.	Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Targeted) s.d. Triwulan I Tahun 2021	7
Gambar 6.	Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random) s.d. Triwulan I Tahun 2021	7
Gambar 7.	Profil Sertifikasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2021	8
Gambar 8.	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2021	8
Gambar 9.	Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2021	9
Gambar 10.	Profil Profil Laporan Efek Samping s.d Triwulan I Tahun 2021	9
Gambar 11.	Perkembangan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia Triwulan I 2021	10
Gambar 12.	Grafik Penerbitan Siaran Pers	12
Gambar 13.	Realisasi Kegiatan Pelayanan Informasi Kepada Media	13
Gambar 14.	Pertumbuhan <i>Audience</i> Media Sosial Badan POM Triwulan I Tahun 2021	13
Gambar 15.	Engagement Media Sosial Badan POM Triwulan I Tahun 2021	13
Gambar 16.	Top Engagement Content pada Platform <i>Facebook</i> Triwulan I Tahun 2021	14
Gambar 17.	Top Engagement Content pada Platform <i>Twitter</i> Triwulan I Tahun 2021	14
Gambar 18.	Jumlah Pemberitaan tentang Badan POM selama Triwulan I Tahun 2021	14
Gambar 19.	Diagram Sebaran Pemberitaan Badan POM di Media Triwulan I Tahun 2021	15
Gambar 20.	Profil Pengguna Layanan dan Informasi dan layanan Pengaduan yang diberikan Badan POM Berdasarkan Komoditi	15
Gambar 21.	Profil Media Komunikasi dan Data Layanan Pengaduan yang Digunakan Badan POM untuk Memberikan Informasi dan Menerima Pengaduan	15
Gambar 22.	Tampilan Antarmuka Layanan e-sertifikasi Badan POM	17
Gambar 23.	Formulir Entri Data Sampling dan Pengujian	17
Gambar 24.	Pelaksanaan Tinjau Ulang Proses Bisnis POM-08 tanggal 18 Maret 2021	20



BADAN POM

HIGHLIGHT

s.d. TRIWULAN I TAHUN 2021

Badan POM Raih Anugerah Meritokrasi dengan Predikat Sangat Baik

Jakarta / Kamis (28/01/2021)



Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito menerima secara langsung Piagam Penghargaan Penerapan Sistem Merit dengan kategori “Sangat Baik” dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Tjahjo Kumolo yang didampingi oleh Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto. Hadir pada acara tersebut Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, 13 Menteri, Sekretaris Kabinet, 8 Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 10 Kepala Daerah Pemerintah Provinsi, dan 20 Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Indonesia dan Korea Selatan Perkuat Kerja Sama di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Dalam rangka memperkuat kerja sama di antara Otoritas Regulator Obat dan Makanan Indonesia dan Korea Selatan, Badan POM dan *Ministry of Food and Drug Safety* (MFDS) telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Pengawasan Keamanan dan Mutu Produk Pangan dan Farmasi, Kamis (28/01). MoU ditandatangani secara *desk to desk* oleh Kim Ganglip, *Minister of Ministry of Food and Drug Safety of the Republic of Korea*, di Osong, Korea dan Penny K. Lukito, Kepala Badan POM RI di Jakarta. MoU ini merupakan perpanjangan dari MoU dengan MFDS yang sebelumnya bernama *Korea Food and Drug Administration/ KFDA*). Diharapkan dengan adanya MoU ini akan semakin memperkuat hubungan yang sudah terjalin erat dan sangat strategis di antara kedua Otoritas Regulator. Kepala kedua lembaga telah bertemu secara bilateral pada kunjungan kerja Kepala Badan POM ke Korea pada tanggal 8-11 Desember 2018. Dalam kesempatan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk memfinalisasi *draft* MoU dalam rangka meningkatkan kolaborasi regulatori dan mendorong hubungan perdagangan kedua negara.

Jakarta / Kamis (28/01/2021)



Badan POM Tetapkan Vitamin D 1000 IU Sebagai Suplemen Kesehatan dan Melatonin Sebagai Suplemen Kesehatan untuk Keperluan Khusus

Jakarta / Kamis (11 /02/2021)



Badan POM menyelenggarakan sosialisasi dua keputusan yaitu Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.08.20.385 Tahun 2020 tentang Penetapan Vitamin D 1000 IU sebagai Suplemen Kesehatan serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.12.20.1417 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Pengawasan Melatonin Sebagai Suplemen Kesehatan untuk Keperluan Khusus.

Kepala Badan POM menyatakan “Terbitnya Keputusan Kepala Badan POM tentang Penetapan Vitamin D 1000 IU sebagai Suplemen Kesehatan ini diharapkan akan mendorong industri lokal untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar Vitamin D 1000 IU di dalam negeri, sehingga peredaran produk Vitamin D 1000 IU ilegal tidak terjadi lagi,” ungkap Kepala Badan POM. “Dan dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan POM tentang Penetapan dan Pengawasan Melatonin Sebagai Suplemen Kesehatan untuk Keperluan Khusus, diharapkan Melatonin dapat beredar secara resmi di Indonesia”.

Dukung Usaha Pangan Olahan dalam Negeri Berdaya Saing, Badan POM Luncurkan Aplikasi Rumah Informasi Registrasi Pangan Olahan

Sebagai upaya dalam meningkatkan sistem pengawasan pangan nasional yang efektif, Badan POM melakukan terobosan dengan melakukan peluncuran Aplikasi Rumah Informasi Registrasi Pangan Olahan. Terobosan ini searah dengan kebijakan Pemerintah mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja dalam mewujudkan kemudahan dan kepastian berusaha di Indonesia. Juga sejalan dengan arahan Presiden RI bagi Pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kepala Badan POM menyebut Aplikasi Rumah Informasi Registrasi Pangan Olahan merupakan salah satu terobosan dalam penyebarluasan informasi dalam rangka meningkatkan pemahaman para pelaku usaha di bidang Registrasi Pangan Olahan.

Jakarta / Selasa (09/02/2021)



Badan POM Terbitkan EUA, Vaksin CoronaVac Sinovac Siap Disuntikkan

Jakarta / Senin (11/01/2021)



Vaksin CoronaVac Sinovac telah resmi kantong izin penggunaan darurat/ *Emergency Use Authorization* (EUA) dari Badan POM. Kepala Badan POM RI Penny K. Lukito umumkan penerbitan EUA Vaksin CoronaVac produksi Sinovac di Kantor Badan POM. Dengan demikian vaksin siap disuntikkan kepada masyarakat pekan ini untuk percepatan penanganan COVID-19.

Penerbitan EUA ini sekaligus memantapkan program vaksinasi COVID-19 yang akan dimulai dua hari ke depan yakni 13 Januari 2021. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih mengimbau para tenaga kesehatan dan masyarakat mendukung program vaksinasi COVID-19. Jangan ada polemik karena vaksin telah mendapat izin Badan POM yang berarti terjamin keamanan, khasiat, dan mutunya.

Berdayakan UMK Secara Sinergis dan Kontinu, Badan POM Launching Program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK) memiliki peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, perluasan lapangan kerja, serta menjadi alternatif usaha di masa krisis. Terutama UMK Pangan sebagai sektor yang paling diminati di penjualan *e-commerce* di tahun 2019 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020. Berbekal aset tersebut, Badan POM berdayakan peran UMK di bidang pangan melalui Program Orang Tua Angkat UMK Pangan Olahan.

“Program Orang Tua Angkat Pemberdayaan UMK Pangan Olahan ini adalah upaya sinergis yang dilakukan antara Pemerintah dan Dunia Usaha dalam rangka menumbuhkan iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha UMK,” terang Kepala Badan POM dalam sambutannya. Dukungan yang diberikan oleh industri sebagai Orang Tua Angkat, antara lain berupa hibah pendanaan, peralatan, atau peningkatan kapasitas bagi UMK yang menjadi anak angkat. Badan POM sebagai pemrakarsa akan terus mengawal agar program ini berjalan dengan baik.

Bandung / Kamis (25/03/2021)





BADAN POM

HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

s.d. TRIWULAN I TAHUN 2021

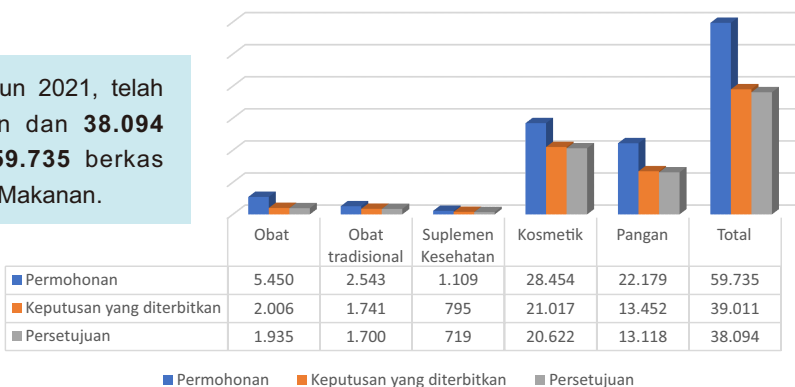
I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat dan Mutu Obat dan Makanan

Pengawasan *pre-market*

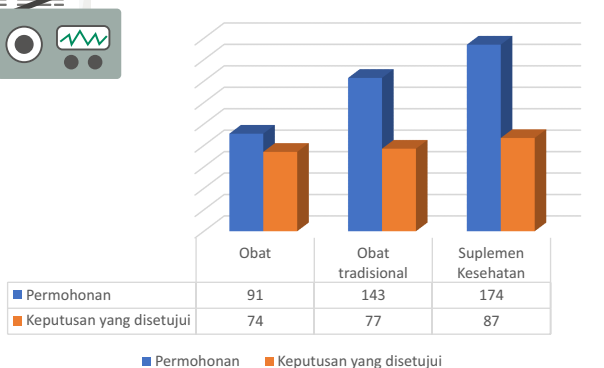
Sebelum Obat dan Makanan diproduksi atau diimpor dan diedarkan di wilayah Republik Indonesia, Obat dan Makanan harus melalui registrasi oleh BPOM untuk dievaluasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu serta informasi melalui penandaan/label.



Sampai dengan Triwulan I tahun 2021, telah diterbitkan **39.011** keputusan dan **38.094** persetujuan izin edar dari **59.735** berkas permohonan registrasi Obat dan Makanan.



NEWS



Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan I Tahun 2021

Untuk melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan, BPOM telah melakukan evaluasi rancangan iklan terhadap kebenaran klaim iklan khusus obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan ijin edar sebelum ditayangkan atau diedarkan. **Sampai dengan Triwulan I tahun 2021, dari 408 permohonan persetujuan rancangan iklan, telah disetujui 238 (58,33%) iklan.**

Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/ Dipublikasikan s.d. Triwulan I Tahun 2021

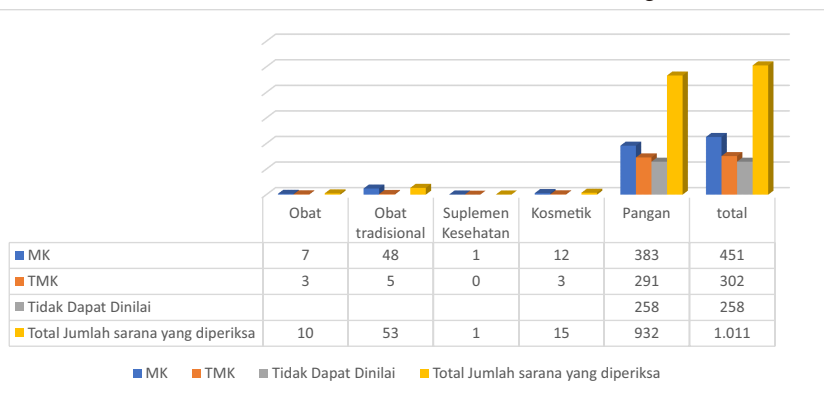
Pengawasan *post-market*

Pengawasan *post-market* dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu serta informasi produk sesuai dengan yang disetujui, dilakukan melalui :

1

Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

B POM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin kepatuhan implementasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Yang Baik.

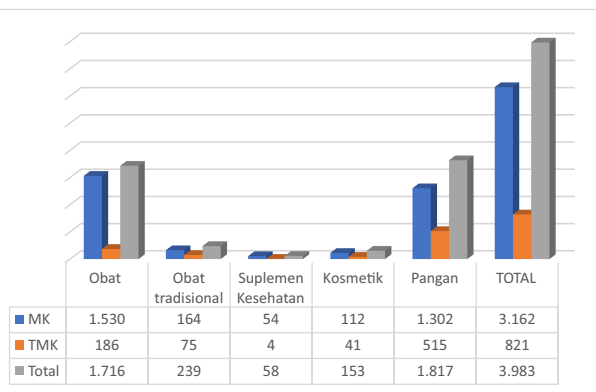


Sampai dengan Triwulan I tahun 2021 telah diperiksa sebanyak **1.011 sarana produksi** Obat dan Makanan dengan **302 (29,87%) sarana** adalah **TMK**.

Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan s.d. Triwulan I tahun 2021

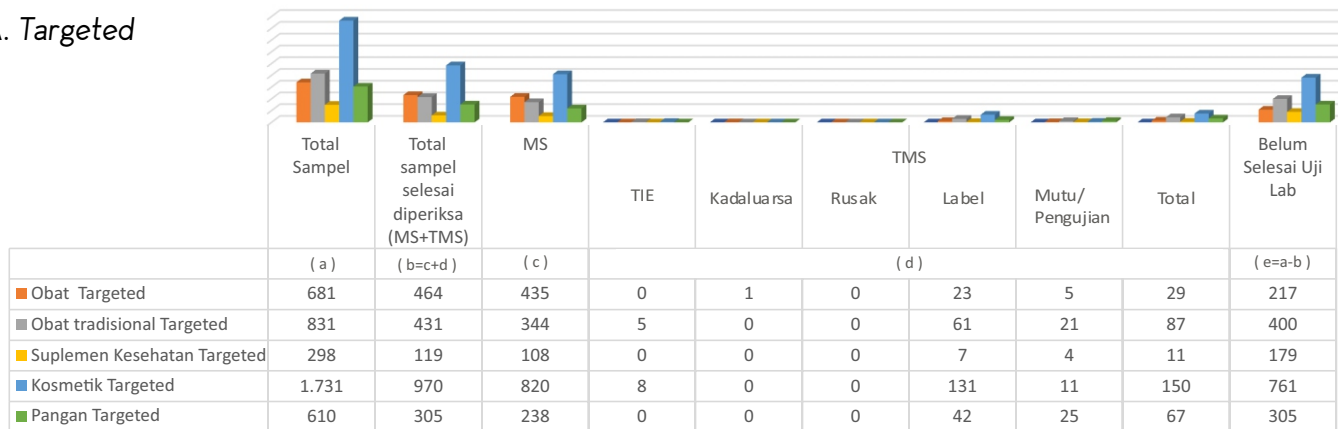
Keterangan:
MK = Memenuhi Ketentuan
TMK = Tidak Memenuhi

Sampai dengan Triwulan I tahun 2021 telah diperiksa **3.983 sarana distribusi** Obat dan Makanan dengan **821 (20,61%) sarana** adalah **TMK**.



Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan s.d. Triwulan I tahun 2021

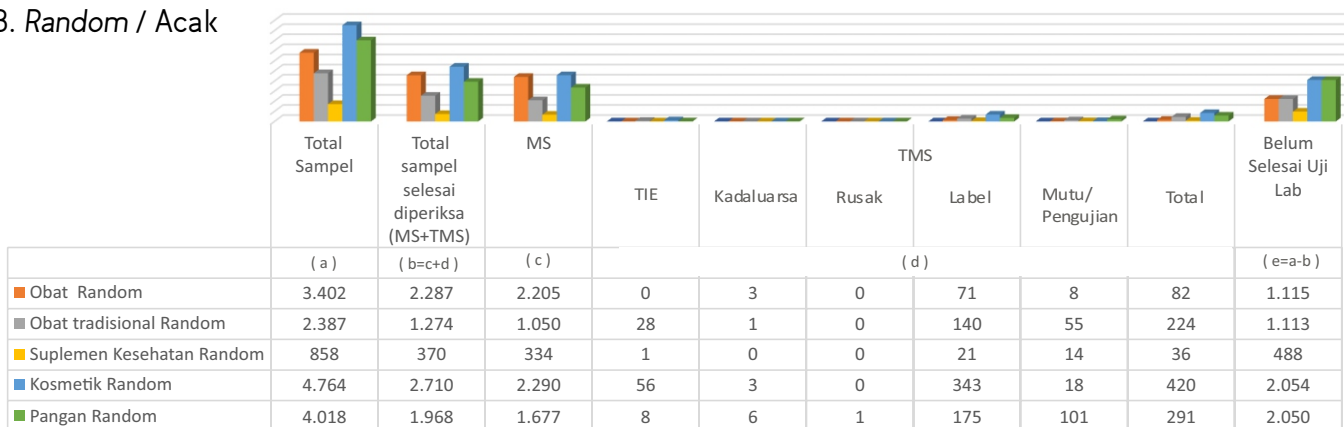
A. Targeted



Gambar 5. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Targeted) s.d. Triwulan I tahun 2021

Sampai dengan **Triwulan I tahun 2021**, dari **4.151 sampel targeted** yang disampling terdapat **2.289 sampel** yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana **344 (15,03%)** sampel tidak memenuhi syarat.

B. Random / Acak



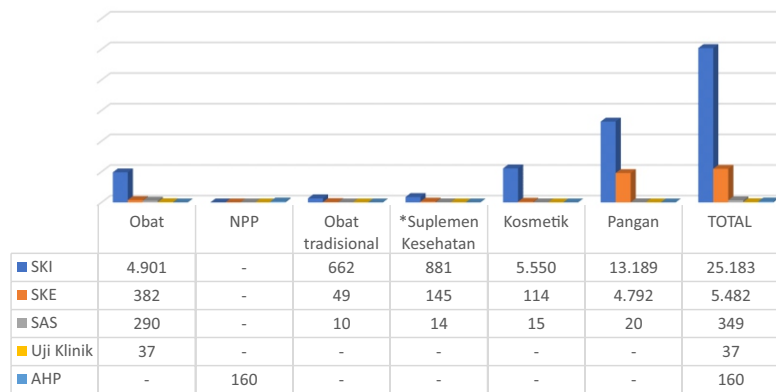
Gambar 6. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random) s.d. Triwulan I tahun 2021

Sampai dengan **Triwulan I tahun 2021**, dari **15.429 sampel random** yang disampling terdapat **8.609 sampel** yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana **1.053 (12,23%)** sampel tidak memenuhi syarat.

Keterangan:
 MS = Memenuhi Syarat
 TMS = Tidak Memenuhi Syarat
 TIE = Tanpa Izin Edar

* Sumber data Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)

Dalam rangka mendorong ekspor dan impor pengawasan Produk dan Bahan Baku yang masuk ke wilayah Indonesia, BPOM mengeluarkan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), SAS (*Special Access Scheme*), Uji Klinik, dan AHP (Analisa Hasil Pengawasan) Obat dan Makanan. Sampai dengan **Triwulan I tahun 2021** telah diterbitkan **25.183 SKI, 5.482 SKE, 349 SAS, 37 Uji Klinik, dan 160 AHP** Obat dan Makanan.

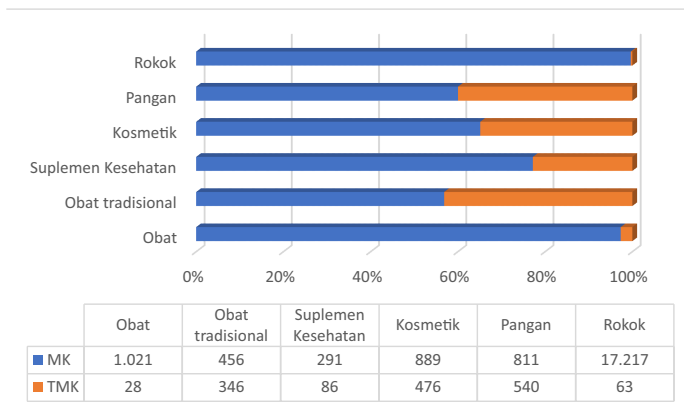


* Termasuk Kuasi

Gambar 7. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan I tahun 2021

Pengawasan Iklan

4



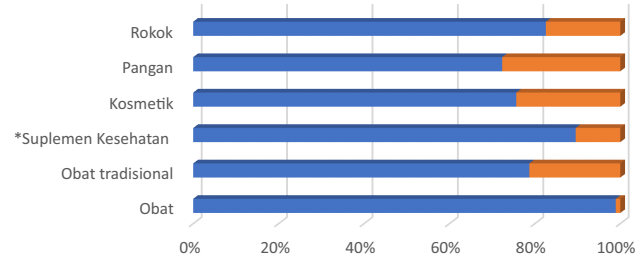
Untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang produk Obat dan Makanan, BPOM melakukan pengawasan iklan produk di beberapa jenis media antara lain media cetak, televisi, radio, luar ruang dan *leaflet*/brosur. **Sampai dengan Triwulan I tahun 2021, dari 22.224 iklan Obat dan Makanan yang diawasi, 1.539 (6,92%) iklan tidak memenuhi ketentuan.**

Gambar 8. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan s.d. Triwulan I tahun 2021



BPOM juga mengawasi kesesuaian label produk Obat dan Makanan yang beredar dengan yang telah disetujui BPOM, agar tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat. **Sampai dengan Triwulan I tahun 2021, dari 11.488 label Obat dan Makanan yang diawasi, sebanyak 1.148 atau**

sekitar 9,99% label tidak memenuhi ketentuan.



	Obat	Obat tradisional	*Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Rokok
MK	6.795	765	283	758	1.308	431
TMK	73	207	33	244	500	91

Gambar 9. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan s.d. Triwulan I tahun 2021

* Termasuk Kuasi

6

Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan (MESSK), Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS)

Penggunaan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik oleh berbagai kalangan masyarakat, maka resiko timbulnya efek yang tidak diinginkan tetap ada. Oleh karena itu, BPOM melakukan evaluasi aspek keamanan produk yang beredar terhadap seluruh laporan efek samping yang diterima dari masyarakat dan/atau tenaga kesehatan, dengan membentuk Tim/Panitia

- ⊙ MESO, MESOT, dan MESSK terdiri dari ahli farmakologi/farmakologi klinik dan beberapa tenaga ahli lainnya
- ⊙ MESKOS terdiri dari dokter spesialis kulit.



	Jumlah Laporan	Jumlah laporan Tindaklanjut	%
Obat	2.102	1.485	70,65
Obat Tradisional	27	27	100,00
Suplemen Kesehatan	1	1	100,00
Kosmetik	185	139	75,14

Gambar 10. Profil Laporan Efek Samping s.d Triwulan I tahun 2021

II. Hasil Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal termasuk palsu serta obat keras di sarana yang tidak berwenang, Badan POM secara terus menerus melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Upaya ini dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya (dalam kerangka Operasi Gabungan Nasional dan Operasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal).

Sampai dengan triwulan I tahun 2021, PPNS Badan POM telah menindaklanjuti 40 perkara. Sebanyak 22 perkara masih dalam tahap SPDP, 4 perkara pada tahap penyidikan Polri, 7 perkara pada tahap I, 1 perkara pada tahap P18/19, 2 perkara pada tahap P21, dan 4 perkara sudah penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU (Tahap II).



Gambar 11. Perkembangan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia Triwulan I 2021

III. Standardisasi

Dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan, telah disusun standar/regulasi/pedoman di Bidang Obat dan Makanan.



Terdapat 12 (dua belas) peraturan/standar/pedoman obat yang sedang dalam proses penyusunan. Daftar 12 (dua belas) peraturan/standar/pedoman obat beserta progres penyusunan selama triwulan I sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik untuk Laboratorium Pengolahan Sel, Sel Punca dan Jaringan (28,57%).
2. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman CPOB Fasilitas Dispensing Obat di Rumah Sakit (28,57%).
3. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pelaporan Kegiatan Distribusi Obat dan Bahan Obat (85,71%).
4. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pengawasan Peredaran Obat dalam Rangka Bukan Perdagangan (28,57%).
5. Rancangan Perubahan Ketiga Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat (100%).
6. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Tata Laksana Uji Bioekivalensi (42,86%).
7. Rancangan Perubahan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Tata Laksana Persetujuan Uji Klinik (28,57%).
8. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Revisi Pedoman Penilaian Khasiat dan Keamanan Antibakteri (14,29%).
9. Standar Obat Non Kompendial (57,14%).
10. Standar Mutu Produk Radiofarmaka (42,86%).
11. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pengawasan Pemenuhan Standar Mutu Obat dan Bahan Obat (28,57%).
12. Buku Tanya Jawab "Mikrobiologi" (14,29%).



Obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan

Terdapat 7 (tujuh) peraturan/standar/pedoman obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang sedang dalam proses penyusunan. Berikut 7 (tujuh) peraturan/standar/pedoman obat beserta progres penyusunan selama triwulan I:

1. Rancangan Peraturan tentang Pedoman Teknis Pengawasan Tanaman Obat Tradisional Tertentu sebagai Obat Tradisional Untuk Keperluan Khusus (25%).
2. Pedoman Uji Farmakodinamik Praklinik Obat Tradisional Lanjutan (25%).
3. Revisi Peraturan Badan POM Nomor 32 tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional (25%).
4. Peraturan Badan POM tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan (Revisi Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan) (25%).
5. Peraturan Badan POM tentang Pengawasan dan Registrasi Obat Kuasi (40%).
6. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika (40%).
7. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (25%).

Target jumlah kajian obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 sebanyak 80 (delapan puluh) kajian, yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) kajian di bidang obat tradisional, 30 (tiga puluh) kajian di bidang suplemen kesehatan, dan 15 (lima belas) kajian di bidang kosmetik. Sampai dengan triwulan I ini telah diselesaikan sebanyak 42 kajian yang terdiri dari 20 (dua puluh) kajian di bidang obat tradisional, 18 (delapan belas) kajian di bidang suplemen kesehatan dan 4 (empat) kajian di bidang kosmetik. Penyusunan kajian dilakukan berdasarkan permintaan *stakeholder*. Topik kajian dapat berupa bahan baku baru, jenis sediaan baru ataupun teknologi pembuatan produk yang baru.



Pangan

Terdapat 10 (sepuluh) peraturan/standar/pedoman pangan olahan yang sedang dalam proses penyusunan. Daftar 10 (sepuluh) peraturan/standar/pedoman beserta progres penyusunan selama triwulan I sebagai berikut:

1. *Review* Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan: Lampiran I-II (20%).
2. Rancangan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan (20%).
3. Rancangan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bahan Tambahan Pangan Campuran (50%).
4. Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan (terkait Probiotik) (20%).
5. Rancangan Surat Keputusan Kepala Badan POM tentang Pencantuman ING untuk Pangan Olahan yang diproduksi oleh Usaha Mikro dan Kecil (20%).
6. Pedoman Implementasi Regulasi Makanan Pendamping - Air Susu Ibu (MPASI) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (30%).
7. Pedoman Implementasi Regulasi Pangan Berasam Rendah/Pangan Steril Komersial untuk UMKM Pangan (20%).

8. Amandemen Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan (78%).
9. Pedoman Implementasi Kategori Pangan 16.0 (Pangan Siap Saji Terkemas) (50%).
10. Naskah Kebijakan (*Policy Paper*) Sinkronisasi Regulasi dan Standar Air Minum (termasuk Air Minum Dalam Kemasan dan Air Minum Isi Ulang) (30%).

Target jumlah kajian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 adalah 200 (dua ratus) kajian. Selama triwulan I telah diselesaikan 50 (lima puluh) kajian. Penyusunan kajian dilakukan berdasarkan permintaan dari *stakeholder*.

IV. Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan

Riset dan Kajian Obat dan Makanan dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan sekaligus dasar penyusunan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, selain itu data hasil riset dan kajian yang berupa informasi dan rekomendasi juga dimanfaatkan untuk mengetahui dan meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 7 topik riset dan kajian prioritas yang dilaksanakan BPOM pada tahun 2021 dengan progres triwulan I sebagai berikut:

1. Kajian dalam rangka Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan POM (35%).
2. Desain dan Metodologi Survei Data Dasar Pengawasan Obat dan Makanan (25%).
3. Riset *Antibiotic Resistance* pada Tata Kelola Program Jaminan Kesehatan Nasional (30%).
4. Riset dan Kajian Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan untuk Mendukung UMKM (30%).
5. Kajian Keamanan Pangan INARAC: Cemaran Mikroplastik dan *Emerging Issue* pada Air Minum dan Air Produksi Obat dan Makanan (39%).
6. Kajian Keamanan Pangan INARAC : Cemaran Arsen Inorganik dalam Produk Beras dan Produk Ikan (45%).
7. Kajian Evaluasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat Dan Makanan (DAK POM) (22%).

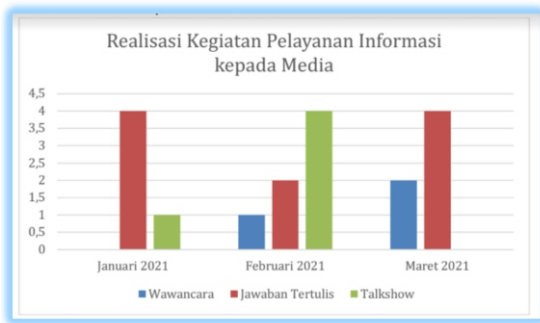
V. Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat

Pada triwulan I tahun 2021, Badan POM telah menerbitkan 15 (lima belas) siaran pers dan 5 (lima) penjelasan/klarifikasi Badan POM terkait isu Obat dan Makanan. Selama Januari – Maret 2021, penerbitan siaran pers paling banyak terjadi di bulan Maret yaitu sebanyak 8 (delapan) terbitan sedangkan penjelasan/klarifikasi paling banyak diterbitkan di bulan Januari yaitu 3 (tiga) penjelasan. Pada triwulan ini, bahasan isu yang paling sering diterbitkan dalam siaran pers maupun penjelasan/klarifikasi adalah terkait pengawasan Obat, terutama topik vaksin karena Indonesia sedang melakukan program vaksinasi di awal tahun. Seluruh siaran pers dan penjelasan/klarifikasi berita dipublikasikan melalui *website* dan media sosial Badan POM.



Gambar 12. Grafik Penerbitan Siaran Pers

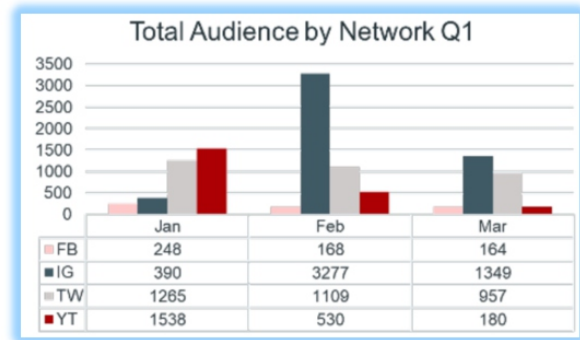
Selama triwulan I tahun 2021, Badan POM telah melakukan sebanyak 18 (delapan belas) kali kegiatan pelayanan informasi kepada media, antara lain melalui 13 (tiga belas) kali wawancara langsung Pimpinan Badan POM dengan media dan 5 (lima) kali *talkshow* atas permintaan media. Sepuluh dari tiga belas permohonan wawancara dari media atau sebesar 76,92% ditindaklanjuti melalui jawaban tertulis dari Badan POM. Pemberian jawaban secara tertulis dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan efektivitas waktu penyampaian jawaban kepada media, terutama selama masa pandemi COVID-19.



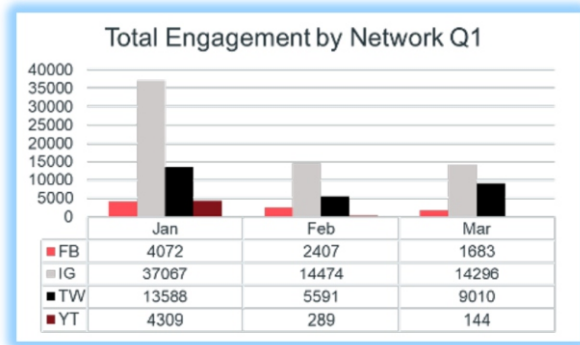
Gambar 13. Realisasi Kegiatan Pelayanan Informasi kepada Media

Pada triwulan I tahun 2021, aktivitas media sosial Badan POM pada 4 platform media sosial yaitu Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube mencapai 973 posts. Platform Twitter adalah platform yang memiliki aktivitas tertinggi sebanyak 566 tweets dibandingkan dengan 3 platform media sosial lainnya. Aktivitas tertinggi kedua adalah Instagram sebanyak 271 posts, menyusul Facebook dengan 111 posts, serta Youtube sebanyak 25 video.

Sementara itu, pertumbuhan audience pada triwulan I terhadap 4 platform media sosial terpantau fluktuatif. Instagram merupakan platform dengan total audience tertinggi di triwulan I ini dengan jumlah audience sebanyak 5.016, sementara di peringkat kedua ada platform Twitter dengan jumlah audience sebanyak 3.331. Diikuti oleh platform Youtube dengan jumlah 2.248 audience dan terakhir adalah platform Facebook dengan 580 audience.



Gambar 14. Pertumbuhan Audience Media Sosial Badan POM Triwulan I Tahun 2021



Gambar 15. Engagement Media Sosial Badan POM Triwulan I Tahun 2021

Badan POM juga secara aktif menyampaikan informasi seputar kegiatan strategis yang dilakukan Badan POM melalui berita aktual yang diunggah melalui website resmi Badan POM dan disebarikan kepada media massa. Tercatat 47 (empat puluh tujuh) berita aktual telah dipublikasikan, yang merupakan hasil peliputan kegiatan Badan POM selama periode triwulan I tahun 2021. Adapun peliputan kegiatan Badan POM yang telah dilakukan adalah sebanyak 108 (seratus delapan) kegiatan, baik yang terselenggara di dalam kota maupun di luar kota. Sebagai informasi, tidak seluruh peliputan kegiatan Badan POM dijadikan berita aktual.

Pada triwulan I, engagement pada setiap platform mengalami pertumbuhan. Engagement tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan total 59.036, diikuti bulan Maret sebesar 25.133, dan Februari sebesar 22.761. Dari keempat platform tersebut, hanya engagement dari platform Instagram yang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, terutama pada bulan Januari, sebesar 37.067.



Gambar 16. Top engagement content platform Facebook pada Triwulan I Tahun 2021

Top engagement content pada platform Facebook adalah konten kepastian keamanan vaksin COVID-19 yang bertanggal 4 Januari 2021. Konten ini mendapat total engagement sebesar 392.



Gambar 17. Top engagement content platform Twitter pada Triwulan I Tahun 2021

Top engagement content pada triwulan I untuk platform Instagram terdapat pada konten Infografis Penerbitan *Emergency Use Authorization* (EUA) Pertama untuk Vaksin Covid-19, dengan total engagement sebesar 2.961.

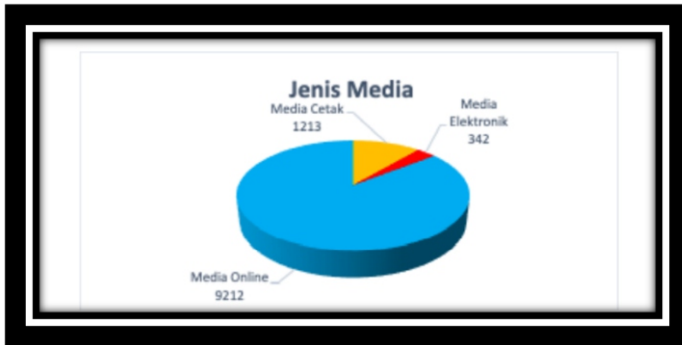
Bulan	Positif	Netral	Negatif	Total
Januari	1.887	2.203	1	4.091
Februari	1.142	1.615	1	2.758
Maret	1.240	2.678	0	3.918

Gambar 18. Jumlah Pemberitaan tentang Badan POM selama Triwulan I Tahun 2021

Top engagement content pada platform Twitter terdapat pada tweet “Penjelasan Badan POM tentang Informasi Lebih Lanjut Keamanan Vaksin Covid-19 AstraZeneca” yang mampu memperoleh engagement sebesar 4.785.

Untuk platform Youtube, konten yang paling banyak mendapatkan engagement adalah konten Konferensi Pers “*Emergency Use Authorization* (EUA) Vaksin Covid-19” yang mencapai 3.698 engagement.

Selama triwulan I tahun 2021 terdapat 10.767 pemberitaan terkait Badan POM. Pemberitaan tersebut terdiri dari pemberitaan terkait Obat dan Makanan secara umum dan Badan POM secara khusus. Dari seluruh pemberitaan tersebut, distribusi sentimen berita mengenai Badan POM didominasi pemberitaan bertonasi netral, yaitu sebanyak 6.496 berita (60,33%), diikuti dengan pemberitaan bertonasi positif sebanyak 4.269 berita (39,65%) dan 2 berita (0,02%) bertonasi negatif.

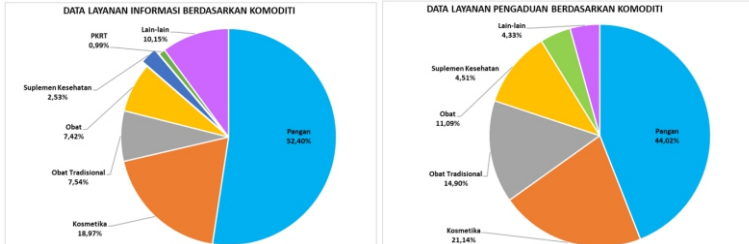


Gambar 19. Diagram Sebaran Pemberitaan Badan POM di Media Triwulan I Tahun 2021

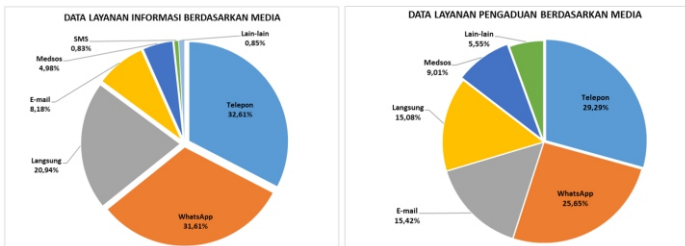
Berdasarkan jenis media, pemberitaan terkait Badan POM didominasi oleh pemberitaan melalui media *online*, yaitu sebanyak 9.212 berita (85,56%), selanjutnya diikuti 1.213 berita (11,27%) melalui media cetak dan 342 berita (3,18%) melalui media elektronik.

Tahun 2021 diawali dengan pemberitaan terkait EUA vaksin COVID-19 yang pertama kali diterbitkan dan vaksinasi perdana dilaksanakan. Sedangkan pada bulan Februari terdapat 2 kali penerbitan EUA yaitu vaksin CoronaVac yang diizinkan digunakan untuk lansia serta vaksin COVID-19 produksi Bio Farma, kedua EUA tersebut cukup banyak menarik perhatian media untuk memberitakan namun tidak sebanyak pemberitaan di bulan sebelumnya.

Sedangkan pada bulan Maret, 10 pemberitaan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, beberapa cukup berpengaruh terhadap kenaikan jumlah pemberitaan, di antaranya terkait isu penghentian penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca karena masalah pembekuan darah di Eropa dan isu terkait perizinan vaksin Nusantara yang dibahas pada Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI. Berdasarkan hal tersebut di atas meskipun terdapat pemberitaan bertone negatif pada bulan Januari dan Februari. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Badan POM sudah dipandang cukup baik, terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baik terkait EUA vaksin COVID-19 maupun berbagai bentuk pengawalan serta percepatan penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan Badan POM.



Gambar 20. Profil Pengguna Layanan dan Informasi dan layanan Pengaduan yang diberikan Badan POM Berdasarkan Komoditi



Gambar 21. Profil Media Komunikasi dan Data Layanan Pengaduan yang Digunakan Badan POM untuk Memberikan Informasi dan Menerima Pengaduan

Topik informasi yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat yaitu informasi terkait proses pendaftaran sebanyak 7.286 (55,68%) layanan dan proses sertifikasi sebanyak 2.100 (16,05%) layanan. Topik lain yang sering ditanyakan antara lain tentang desain kemasan, produsen/distributor, label halal, indikasi/khasiat, zat pengawet, informasi lowongan pekerjaan di BPOM/magang/penelitian, informasi nomor kontak dan alamat unit di BPOM, serta petugas pelayanan publik. Pengaduan tentang inspeksi tersebut antara lain terkait pengaduan produk obat dan makanan ilegal/palsu/substandar/tidak memenuhi syarat serta sarana ilegal yang membutuhkan tindak lanjut dan pemeriksaan lapangan. Sedangkan pengaduan tentang proses pendaftaran antara lain terkait kendala penggunaan aplikasi pendaftaran Obat dan Makanan, Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) tidak valid, status Surat Perintah Bayar (SPB) tidak *update*, serta verifikasi akun perusahaan pada saat pendaftaran yang dinilai lama.

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2021



VI. Digitalisasi Pelayanan Publik

1. Pengembangan Aplikasi e-sertifikasi

Pengembangan Sistem Informasi merupakan bagian dari pelaksanaan *e-government* yang berkelanjutan. Lebih dari sekedar elektronisasi proses bisnis, *e-government* juga mengarah pada saling terhubungnya satu sama (interkoneksi dan integrasi).

Telah diterapkannya tanda tangan elektronik (TTE) sejak tanggal 8 Maret 2021, terhadap layanan-layanan sebagai berikut:

- Modul Sertifikasi dan Resertifikasi (CPOB, CPOTB, CPKB dan CPPOB) terkini.
- Modul Persetujuan Fasilitas Bersama dan Pengajuan Registrasi Obat impor.
- Fitur TTE pada modul sertifikasi dan resertifikasi (CPOB, CPOTB, CPKB dan CPPOB), modul fasilitas bersama obat dan non obat dan modul registrasi obat impor.
- Modul Pemeriksaan Sarana Pendaftaran Pangan Olahan.

2. Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT)

Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) merupakan sarana pelaporan hasil kegiatan pengawasan Obat dan Makanan secara elektronik yang dilakukan oleh seluruh UPT serta Unit Teknis di Pusat. Modul pelaporan yang telah tersedia di SIPT saat ini meliputi:

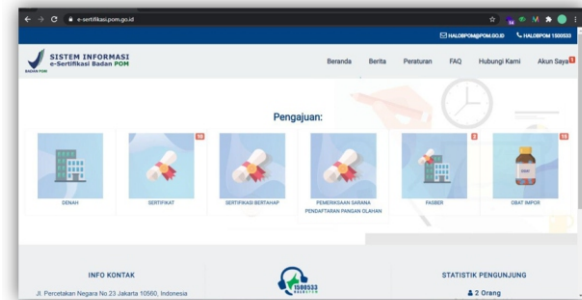
- Pemeriksaan Sarana (Produksi, Distribusi dan Saranan Pelayanan Kefarmasian)
- Sampling dan Pengujian
- Pengawasan Iklan dan Penandaan

Saat ini data SIPT v.3 telah mengalir dan dapat dipantau melalui *dashboard* Badan POM *Operational Center* (BOC). Modul baru yang telah diimplementasikan pada triwulan I di antaranya adalah:

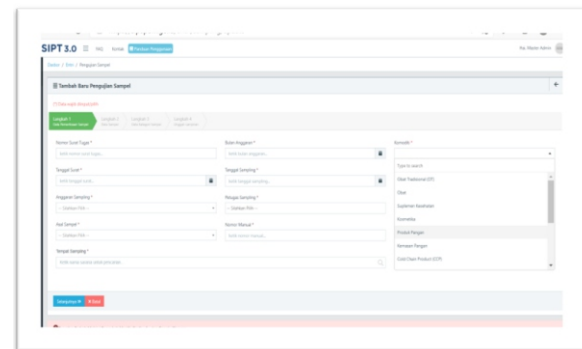
- Pemeriksaan sarana dalam rangka intensifikasi vaksin
- Pengawasan penandaan komoditi selain obat

Implementasi penggunaan SIPT v3 Tahun 2021 pada triwulan I yaitu sebagai berikut:

- Entri data pada modul Pemeriksaan Sarana, Pengujian Pihak Ketiga, Pengawasan Iklan Obat dan Rokok serta Pengawasan Penandaan Rokok 2021 sudah dapat dilakukan sejak **1 Januari 2021**
- Entri data pada modul sampling dan pengujian seluruh komoditi serta pengawasan penandaan dapat dilakukan mulai tanggal **29 Maret 2021**
- Entri data pada modul pemeriksaan sarana dalam rangka intensifikasi vaksin pada tanggal **5 April 2021**.



Gambar 22. Tampilan Antarmuka Layanan e-sertifikasi Badan POM



Gambar 23. Formulir Entri Data Sampling dan Pengujian

VII. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Sampai dengan triwulan I tahun 2021, telah ditetapkan 9 (Sembilan) Peraturan Badan POM, 57 (lima puluh tujuh) Keputusan Kepala Badan POM, 19 (sembilan belas) Rumusan Perjanjian. Selain itu Badan POM telah melakukan pembahasan 1 (satu) Rancangan Undang-Undang dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah. Bersama dengan Kementerian Kesehatan, Badan POM turut serta dalam pembahasan RPP tentang Revisi PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.



1 Judul RUU

Rancangan Undang-Undang:
Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.



3 Judul RPP

Rancangan Peraturan Pemerintah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan

9 Judul Peraturan Badan POM



Peraturan Badan POM

1. Peraturan Badan POM Nomor 1 tahun 2021 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan
2. Peraturan Badan POM Nomor 2 tahun 2021 Tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat
3. Peraturan Badan POM Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Melalui Penyesuaian/Inpassing
4. Peraturan Badan POM Nomor 4 tahun 2021 Tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan
5. Peraturan Badan POM Nomor 5 tahun 2021 Tentang Standar Keamanan Dan Mutu Minuman Beralkohol
6. Peraturan Badan POM Nomor 6 tahun 2021 Tentang Pengawasan Periklanan Pangan Olahan
7. Peraturan Badan POM Nomor 7 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pom Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan
8. Peraturan Badan POM Nomor 8 tahun 2021 Tentang Bentuk Dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu Yang Dapat Di Produksi Oleh Industri Kosmetika Yang Memiliki Sertifikat Produksi Kosmetika Golongan B
9. Peraturan Badan POM Nomor 9 tahun 2021 Tentang Pelaporan Gratifikasi Di Lingkungan Badan POM

VIII. Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi birokarasi

1. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan sebagai upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan baik di unit kerja Pusat maupun di UPT BPOM. Dalam rangka penataan dan penguatan organisasi UPT BPOM, telah dilakukan evaluasi klasifikasi UPT yang mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM. Evaluasi klasifikasi UPT dilakukan terhadap kriteria unsur pokok dan unsur penunjang yang mencerminkan beban kerja tugas dan fungsi teknis operasional UPT. Berdasarkan hasil evaluasi klasifikasi yang dilakukan tahun 2020, direkomendasikan peningkatan klasifikasi UPT yang terdiri atas: 4 (empat) Balai POM menjadi Balai Besar POM; 15 (lima belas) Loka POM menjadi Balai POM; dan pembentukan 3 (tiga) Loka POM.

Usulan rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada Kementerian PANRB dan terus berproses hingga triwulan pertama tahun 2021 dengan penyampaian surat Sekretaris Utama Nomor B-OT.01.02.2.22.01.21.39 tanggal 19 Januari 2021 hal Permohonan Rekomendasi Peningkatan Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM. Surat tersebut sebagai tindak lanjut Surat Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nomor B/1393/KT.01/2020 tanggal 7 Oktober 2020 hal Tindak Lanjut Atas Permohonan Rekomendasi Peningkatan Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.

Disamping melalui evaluasi klasifikasi UPT, evaluasi juga dilakukan berdasarkan pada lingkungan strategis terakhir Pengawasan Obat dan Makanan di suatu wilayah. Sebagai contoh evaluasi kedudukan Loka POM di Indragiri Hilir serta evaluasi klasifikasi UPT BPOM di Provinsi Kalimantan Utara.

2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2021

Sebagai upaya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan organisasi dan tata kerja serta perkembangan kebijakan RB, BPOM menetapkan 2 (dua) kebijakan RB yaitu:

- a. Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.02.21.101 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Unit Kerja di Lingkungan BPOM; dan
- b. Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.03.21.126 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi BPOM, di antaranya memuat:
 - 1) Penyesuaian nomenklatur Unit Kerja sesuai Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM.
 - 2) Perubahan komposisi susunan keanggotaan Tim Pelaksana RB BPOM dan Tim Asesor PMPRB dan Monev RB BPOM.

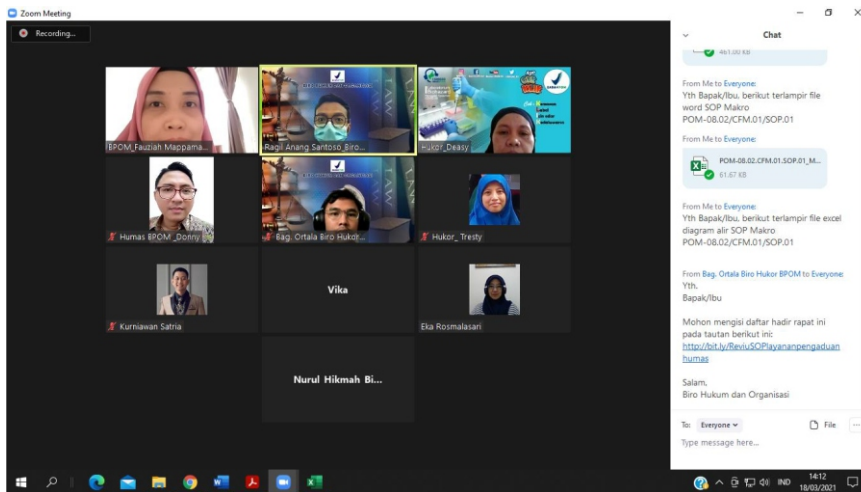
3. Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Sebagai pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang baik, BPOM melakukan penilaian kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) terhadap 14 (empat belas) unit kerja pusat dan 33 (tiga puluh tiga) UPT Balai Besar/Balai POM.

Penilaian kinerja UPP dilakukan pada triwulan kedua, namun dalam rangka perbaikan pelaksanaan UPP di tahun 2021 maka pembahasan pembentukan Tim Penilai Internal UPP telah dilakukan pada tanggal 22 Maret 2021. Hal ini bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup dalam rangka persiapan penilaian UPP yang dilakukan Tim Penilai.

4. Tinjau Ulang Proses Bisnis dalam Rangka Penerapan QMS di Lingkungan BPOM

Tinjau ulang proses bisnis disesuaikan dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, telah dilaksanakan berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-OT.02.02.2.22.01.21.10 tanggal 7 Januari 2021 tentang Tinjau Ulang Proses Bisnis. Kegiatan dimulai dari minggu I Januari s.d. minggu V Maret 2021. Pembahasan proses bisnis BPOM meliputi tinjau ulang untuk peta proses bisnis, peta sub proses bisnis, peta lintas fungsi dan SOP Makro melibatkan Unit Kerja Pusat, Balai Besar, Balai dan Loka POM. Hasil pembahasan yang dilakukan merujuk pada prinsip SERA, yaitu penyederhanaan proses (*Simplification-S*), penghilangan proses yang tidak perlu (*Elimination-E*), pembuatan proses yang sama sekali baru (*Reengineering-R*), dan pengautomatisasian (*Automation-A*) akan disosialisasikan pada bulan April 2021.



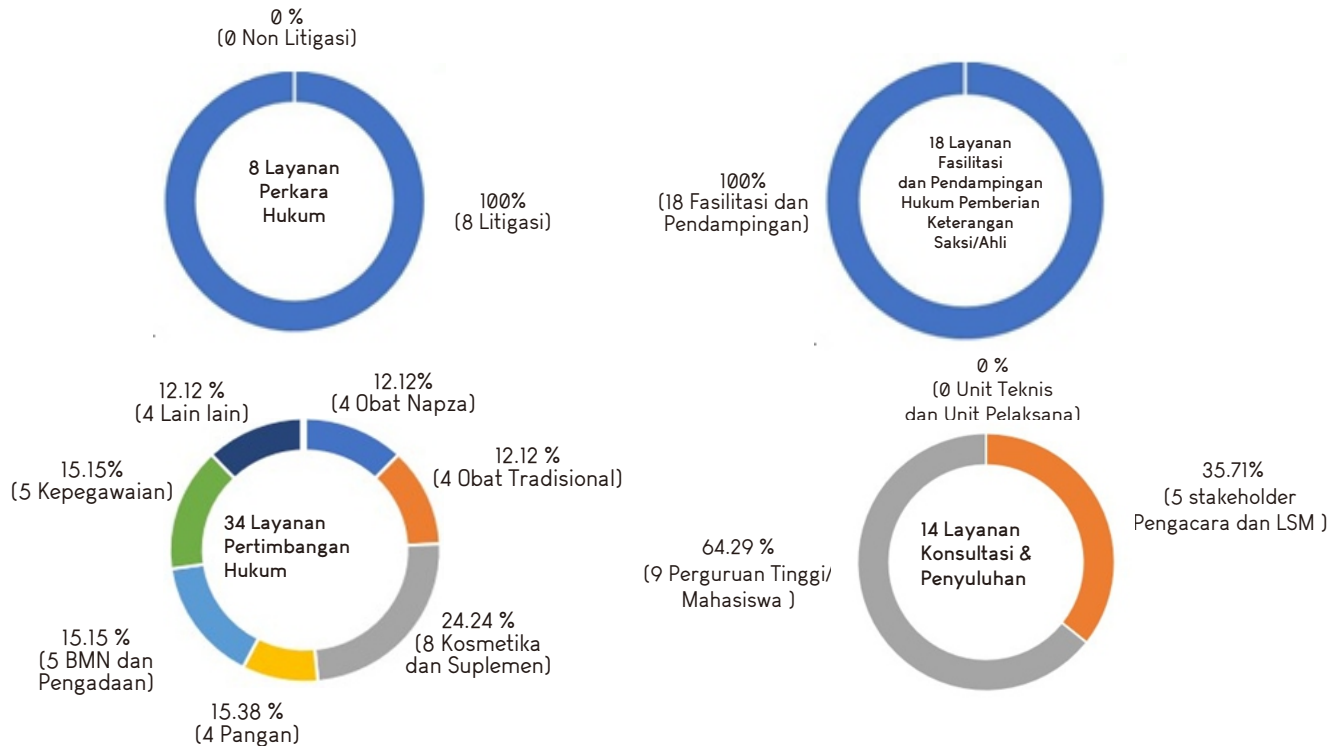
Gambar 24. Pelaksanaan Tinjau Ulang Proses Bisnis POM-08 tanggal 18 Maret 2021

IX. Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum)

Peran unit kerja yang membidangi hukum/legal pada setiap Instansi Pemerintah terkait pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintahan adalah sebagai unit kerja yang mendukung dalam aspek hukum, agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi. Dukungan aspek hukum dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas BPOM berupa Layanan Advokasi Hukum yang terdiri dari pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2021

Jumlah layanan advokasi hukum yang diberikan sejumlah 74 layanan yang terdiri dari :



X. Kerjasama Internasional

Kerjasama yang dilakukan BPOM sampai dengan Triwulan I 2021, adalah:

Knowledge Sharing antara Badan POM dengan *National Center for Expertise of Medicines and Medical Devices (NCEMMD) Kazakhstan* “*Strengthening Cooperation in The Field of Medicines Control Through Knowledge Sharing*” Jakarta – Nur-Sultan, 3 Maret 2021. Badan POM telah menyelenggarakan kegiatan Knowledge Sharing pada tanggal 3 Maret 2021 dengan tema “*Strengthening Cooperation in The Field of Medicines Control Through Knowledge Sharing*”. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi action plan dari *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Badan POM dan NCEMMD yang ditandatangani pada tanggal 2 November 2016 dan berlaku sampai dengan 2 November 2022.

Kegiatan dibuka oleh Ibu Kepala Badan POM, Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP., yang menyampaikan agar regulator dan industri farmasi dapat memanfaatkan platform khusus ini untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan kemudahan regulasi serta mendukung dan menyediakan bantuan ke industri farmasi untuk memastikan agar masyarakat mendapatkan akses obat yang aman, bermutu, dan berkualitas baik terutama dalam masa sulit ini.

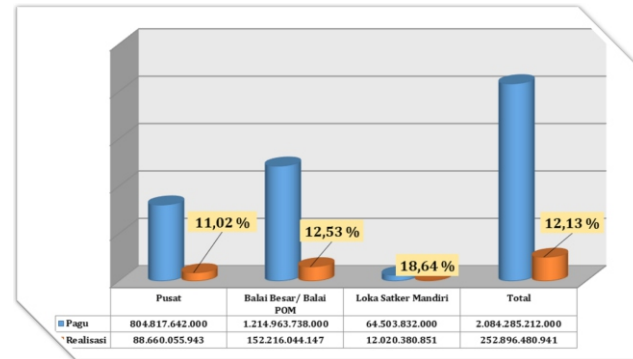
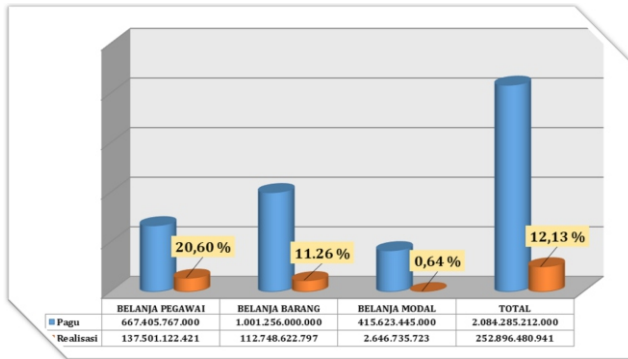
Program knowledge sharing ini bertujuan untuk meningkatkan akses pertukaran informasi terkait pengawasan obat, khususnya mengenai GMP termasuk keanggotaan Badan POM dalam PIC/s, Pharmacovigilance (PV), Standar dan Regulasi termasuk Registrasi. Program ini juga wujud komitmen Badan POM untuk mendorong kolaborasi industri farmasi sebagai sesama anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Kegiatan ini diselenggarakan dalam bentuk webinar yang terdiri dari 3 (tiga) sesi dengan topik *Good Manufacturing Practice (GMP)*, Standar dan Regulasi Obat, dan Pharmacovigilance. Masing-masing topik webinar disampaikan oleh narasumber yang berasal dari regulator kedua negara dan dihadiri oleh 150 peserta secara daring yang terdiri dari regulator Badan POM, regulator NCEMMD Kazakhstan serta pelaku usaha dari Indonesia dan Kazakhstan.

Pada pembukaan kegiatan juga turut hadir Duta Besar RI untuk Republik Kazakhstan Rahmat Pramono, Direktur Jenderal NCEMMD Kazakhstan, Dautbayev Ekren Karimovich, dan perwakilan dari Badan POM, NCEMMD Kazakhstan, serta industri farmasi dari Indonesia dan Kazakhstan.



XI. Pengelolaan Anggaran

Total anggaran BPOM Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.084.285.212.000,- untuk seluruh kegiatan di pusat maupun daerah. Anggaran yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Anggaran tersebut tersebar untuk 30 Satker Pusat, 33 Balai Besar/Balai POM dan 15 Loka Satker Mandiri. Realisasi anggaran Triwulan I tahun 2021 sebesar Rp252.896.480.941,- (12,13%) yang terdiri dari realisasi anggaran untuk 30 Satker Pusat Rp88.660.055.943,- dan realisasi anggaran untuk seluruh Balai Besar/Balai POM Rp152.216.044.147,-, dan realisasi anggaran untuk Loka Satker Mandiri sebesar Rp12.020.380.851,-.



XII. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, BPOM secara rutin telah melakukan pemantauan pelaksanaan RKP BPOM Tahun 2021. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi anggaran serta realisasi pencapaian sasaran kegiatan dan pencapaian sasaran program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, juga kendala yang dihadapi untuk dapat segera diidentifikasi upaya tindak lanjut yang dibutuhkan. Pemantauan capaian RKP dilakukan per triwulan. Hasil pemantauan capaian RKP sampai dengan Triwulan I tahun 2021 sebagaimana terlampir pada buku ini.

PENUTUP

Kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini hanya sebagian dari kinerja keseluruhan BPOM. Namun demikian para pihak terkait diharapkan mendapat gambaran jelas bahwa program dan kegiatan BPOM berorientasi pada pencapaian tujuan utama pembangunan pengawasan obat dan makanan 2021-2024 yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut BPOM akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang, dengan mengutamakan niat baik, komitmen, keterbukaan, perencanaan yang komprehensif (termasuk anggaran), pelaksanaan aksi, evaluasi dan analisis hasil, serta *continuous improvement*.

LAMPIRAN I

CAPAIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengawasan Obat	84,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengawasan Obat Tradisional	76,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengawasan Suplemen Kesehatan	83,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengawasan Kosmetik	76,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengawasan Makanan	79,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	67,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
1.1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	83,60	%	88,53	105,89
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	80,00	%	85,21	106,52
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	86,00	%	86,04	100,04
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	73,00	%	78,03	106,89
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	75,00	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	85,00	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	74,00	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	88,40	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	89,00	%	82,69	92,91
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di masing-masing wilayah kerja UPT	60,00	%	37,74	62,90
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	88,00	%	95,56	108,59
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	55,00	%	48,24	87,71
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	63,00	%	73,52	116,70
		Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	3,76	Nilai Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	74,00	Nilai	92,91	125,55
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	1330,00	Sekolah	(progres 11,78%)	(progres 11,78%)
		Jumlah desa pangan aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	427,00	Desa	(progres 14,17%)	(progres 14,17%)
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	165,00	Pasar	(progres 15,91%)	(progres 15,91%)
		Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85,00	%	18,11	21,31
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	77,00	%	17,36	22,55

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	69,00	%	25,23	36,57
		Indeks RB UPT	85,00	Nilai Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP UPT	85,00	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN UPT	77,00	Nilai Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai Good Laboratory Practise	75,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,00	Nilai Indeks	1,51	75,50
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	94,00	Nilai	36,83	39,18
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Efisien (92%)	%	79,00	85,87
1.2	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase kajian kejahatan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	70,00	%	75,00	107,14
		Persentase kegiatan pengamanan penindakan yang efektif	70,00	%	100,00	142,86
		Persentase kajian strategis kejahatan Obat dan Makanan yang diselesaikan sesuai perencanaan	80,00	%	88,62	110,78
		Persentase data kerawanan kejahatan yang terverifikasi	84,00	%	0,00	0,00
		Persentase kajian taktis kejahatan Obat dan Makanan yang terselesaikan tepat waktu	55,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kegiatan pengamanan dalam rangka penindakan yang terlaksana sesuai perencanaan	65,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks RB Direktorat Pengamanan	89,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengamanan	77,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengamanan yang optimal	2,00	Indeks	1,00	50,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengamanan	Efisien (89%)	%	75,00	84,27
1.3	Intelijen Obat dan Makanan	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	78,00	%	100,00	128,21
		Persentase laporan informasi yang sesuai standar	77,00	%	84,21	109,36
		Persentase laporan intelijen yang sesuai standar	77,00	%	50,00	64,94
		Presentase hasil patroli siber yang efektif	57,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	2,00	Jaringan	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	89,00	Nilai Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalisme ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	77,00	Nilai Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	2,00	Nilai Indeks	1,25	62,50
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen	Efisien (89%)	%	75,00	84,27
1.4	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	Persentase sarana Produksi Obat Tradisional yang memenuhi persyaratan CPOTB	80,00	%	78,57	98,21
		Persentase iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	63,00	%	63,36	100,57

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase pemenuhan pedoman pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan oleh Balai/ Balai Besar POM	82,00	%	90,41	110,26
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	88,00	Nilai Indeks	0,00	0,00
		Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	76,00	%	73,34	96,50
		Persentase hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti	74,00	%	46,48	62,81
		Persentase laporan keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	93,00	%	100,00	107,53
		Jumlah UMKM Obat Tradisional yang difasilitasi dalam pemenuhan CPOTB	96,00	Jumlah	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	61,00	%	0,00	0,00
		Persentase permohonan peNilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	89,00	%	96,80	108,77
		Indeks Pelayanan Publik dibidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	3,46	Nilai Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Tingkat Efektifitas KIE di bidang OT dan SK	90,59	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	90,00	Nilai Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	77,00	Nilai Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang optimal	2,00	Nilai Indeks	0,25	12,50
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	99,00	%	75,00	75,76
1.5	Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Persentase industri pangan olahan yang menerapkan Program Manajemen Risiko	38,00	%	29,58	77,85
		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru Oleh UPT BPOM sesuai dengan NSPK	77,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	87,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	3,46	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Keputusan peNilaian sarana Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang di selesaikan tepat waktu	87,00	%	100,00	114,94
		Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang diselesaikan sesuai standar	87,00	%	92,94	106,83
		Persentase Sarana produksi dan sarana distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan pangan risiko tinggi dan teknologi baru	87,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	50,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang Diberikan	83,00	%	97,41	117,36
		Persentase UPT yang memahami sistem Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	75,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	89,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru	77,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang Optimal	2,00	Indeks	0,25	12,50
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru yang baik	Efisien (90%)	%	75,00	83,33
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Pengawasan Pangan Olahan sesuai standar	125,00	Jumlah	(progres 15%)	(progres 15%)
		Persentase sampel pangan fortifikasi yang diambil dan memenuhi syarat	88,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
1.6	Pengawasan Kosmetik	Persentase Sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan	86,00	%	73,81	85,83
		Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan	86,00	%	61,03	70,96
		Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	84,00	%	82,62	98,36
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	86,00	Nilai Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu	86,00	%	91,71	106,64

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase Hasil Pengawasan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Pelaku usaha/Stakeholder	82,00	%	63,04	76,88
		Persentase laporan keamanan Kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	89,00	%	75,14	84,42
		Persentase UPT yang di lakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	81,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase permohonan peNilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	91,00	%	99,83	109,70
		Indeks Pelayanan Publik dibidang pengawasan kosmetik	3,76	Nilai Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Tingkat Efektifitas KIE dibidang Kosmetik	90,59	Nilai	95,49	105,41
		Jumlah UMKM kosmetik yang difasilitasi dalam pemenuhan CPKB	70,00	Jumlah	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik	89,00	Nilai Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik	77,00	Nilai Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	2,00	Nilai Indeks	0,00	0,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	Efisien (100%)	%	75,00	75,00
1.7	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan pelayanan obat yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	72,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Bidang Distribusi Obat	89,00	Nilai Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diselesaikan	81,00	%	86,79	107,15

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat oleh Balai	66,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Keputusan PeNilai Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan tepat waktu	80,00	%	97,64	122,05
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	3,76	Nilai Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indek RB Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	91,00	Nilai Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	77,00	Nilai Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Pengawasan Distribusi dan pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang optimal	2,00	Nilai Indeks	0,25	12,50
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	Efisien (88%)	%	61,54	69,93
1.8	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor	86,50	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepatuhan pelaku usaha dalam mutu dan keamanan obat dan NPP	93,50	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepatuhan industri Produk Tembakau dalam iklan dan label	47,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	16500,00	Permohonan	5049,00	30,60
		Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	72,00	%	95,60	132,78

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	3,46	Nilai Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Tingkat Efektivitas KIE di bidang obat	89,04	Nilai	95,14	106,85
		Persentase laporan Farmakovigilans yang ditindaklanjuti	70,00	%	70,65	100,92
		Persentase laporan pengawasan mutu, label dan iklan obat dan NPP yang ditindaklanjuti	86,00	%	28,65	33,31
		Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	60200,00	Label dan Iklan	17648,00	29,32
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	91,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	77,00	Nilai Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal	2,00	Nilai Indeks	0,00	0,00
1.9	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan pangan olahan	65,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase hasil pengawasan UPT BPOM yang dilakukan sesuai standar	70,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase sarana produksi dan distribusi pangan olahan risiko rendah dan sedang yang dilakukan pendalam mutu, dan memenuhi ketentuan	60,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan PRRS	89,50	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah wilayah yang dilakukan pengawasan terpadu lintas sektor	5,00	Jumlah	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	55,00	%	50,00	90,91
		Persentase keputusan hasil pengawasan risiko rendah dan sedang yang diselesaikan sesuai standar	94,00	%	80,37	85,50
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan PRRS	3,76	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase ketepatan waktu pelayanan publik terkait sarana dan produk pangan risiko rendah dan sedang	90,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase permohonan ekspor/impor yang diselesaikan tepat waktu	95,00	%	80,69	84,94
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	90,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang	77,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang yang baik	2,00	Indeks	2,50	125,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang yang baik	Efisien (92%)	%	90,00	97,83
		Persentase toko modern yang menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan	30,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase insiden/kasus keamanan pangan yang ditindaklanjuti	86,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
1.10	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase sarana produksi obat yang mandiri dalam pemenuhan CPOB	55,00	%	61,54	111,89
		Persentase fasilitas produksi produk JKN, produk highrisk lainnya, serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	86,00	%	9,38	10,90
		Persentase tindak lanjut yang berkualitas dari hasil pengawasan sarana produksi di Balai	95,00	%	0,00	0,00
		Persentase hasil pengawasan sarana produksi yang ditindaklanjuti	74,00	%	64,29	86,87
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	86,50	Indeks	88,30	102,08
		Persentase sarana produksi obat JKN, Bahan Baku Obat, dan obat highrisk lainnya yang memenuhi persyaratan CPOB	74,00	%	70,00	94,59
		Persentase keputusan peNilaian fasilitas produksi Bahan Baku Obat, obat, produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	70,00	%	88,00	125,71
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	3,76	Nilai Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat inovasi atau obat pengembangan baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawalan inovasi pengembangan obat	65,00	%	81,25	125,00
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	89,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	77,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP yang optimal	2,00	Indeks	1,00	50,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	Efisien (95%)	%	75,00	78,95
1.11	Registrasi Pangan Olahan	Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	81,00	%	60,65	74,88
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan	87,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	79,00	%	60,44	76,50
		Persentase keputusan registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95,00	%	99,84	105,09
		Persentase pengaduan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100,00	%	100,00	100,00
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,36	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase pendampingan di bidang registrasi pangan olahan yang efektif	76,00	%	77,90	102,50
		Persentase deregulasi dan debirokratisasi di bidang registrasi pangan olahan	40,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan	92,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Pangan Olahan	77,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	2,00	Indeks	3,00	150,00
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Efisien (97%)	%	75,00	77,32

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1.12	Registrasi Obat	Persentase obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	73,00	%	62,38	85,45
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang registrasi Obat	84,50	Indeks	88,54	104,78
		Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar	66,00	%	55,39	83,92
		Persentase hasil peNilaian registrasi obat yang diselesaikan tepat waktu	73,00	%	81,76	112,00
		Persen pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Obat yang ditindaklanjuti	100,00	%	100,00	100,00
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat	3,76	Nilai Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase sarana UK/Lab BE yang diinspeksi dan memenuhi CUKB	81,00	%	50,00	61,73
		Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat	100,00	%	100,00	100,00
		Indeks RB Direktorat Registrasi Obat	90,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat	77,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Obat yang optimal	2,00	Indeks	0,25	12,50
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat	Efisien (93%)	%	95,00	102,15
1.13	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	86,00	%	79,19	92,08
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, PeNilaian Uji Pratiklinik/Klinik dan DIP	82,00	Nilai Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	69,00	%	76,32	110,61

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase hasil peNilaian registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan PeNilaian Uji PraliniK/klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu	72,00	%	74,71	103,76
		Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan PeNilaian Uji PraliniK/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	73,00	%	80,07	109,68
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	3,76	Nilai Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase deregulasi dan debirokratisasi di bidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, notifikasi Kosmetik dan PeNilaian Uji Pra Klinik/ klinik dan DIP	40,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase pendampingan di bidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik, PeNilaian Uji PraliniK/Klinik dan DIP yang efektif	76,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	82,00	%	82,50	100,61
		Indeks RB Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	92,00	Nilai Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	77,00	Nilai Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik yang baik	2,00	%	2,00	100,00
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Efisien (96%)	%	75,00	78,13

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1.14	Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83,00	Nilai Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sesuai Roadmap	90,00	%	100,00	111,11
		Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun dibandingkan dengan yang direncanakan	90,00	%	29,00	32,22
		Persentase sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik kepada stakeholder yang efektif	90,00	%	91,60	101,78
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	90,00	%	92,86	103,17
		Indeks RB Unit Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	79,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	2,00	Indeks	2,50	125,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Efisien (100%)	%	88,00	88,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1.15	Standardisasi Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	76,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	86,50	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar Pangan Olahan sesuai roadmap	100,00	%	100,00	100,00
		Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	92,00	%	33,80	36,74
		Persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada stakeholder yang efektif	88,00	%	86,00	97,73
		Persentase inovasi makanan yang difasilitasi melalui standar	80,00	%	51,00	63,75
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	85,00	%	100,00	117,65
		Indeks pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	4,06	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks reformasi birokrasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	90,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	77,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	2,00	Indeks	3,00	150,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Efisien (100%)	%	75,00	75,00
1.16	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	76,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif sesuai roadmap	83,00	%	50,00	60,24

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	86,00	%	41,67	48,45
		Persentase sosialisasi standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif kepada stakeholder yang efektif	92,00	%	33,33	36,23
		Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	89,00	Nilai Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	77,00	Nilai Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang optimal	2,00	Nilai Indeks	0,25	12,50
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Efisien (100%)	%	84,00	84,00
1.17	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Jumlah UMKM pangan yang sesuai standar	52,00	UMKM	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	32,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan	82,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	160,00	Kab/Kota	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan keamanan pangan sesuai Pedoman	82,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	86,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah pelaku UMKM Makanan yang diintervensi keamanan pangan	18000,00	Jumlah	2000,00	11,11
		Jumlah kader/fasilitator yang memahami prinsip keamanan pangan	300,00	Jumlah	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Tingkat efektivitas KIE Makanan	89,37	Nilai	95,32	106,66
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	3,46	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah pemda yang diintervensi keamanan pangan	203,00	Prov/Kab/Kota	52,00	25,62
		Persentase UPT BPOM yang dibina dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	100,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Dit PMPU	90,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Dit PMPU	77,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Dit. PMPU	2,00	Indeks	1,25	62,50
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Dit PMPU	Efisien (91%)	%	82,42	90,57
1.18	Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian	76,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium BPOM	5,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN	86,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	74,00	%	65,01	87,85
		Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan	77,00	%	68,60	89,09
		Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi terhadap standar	87,00	%	25,60	29,42
		Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	92,00	%	89,37	97,14
		Indeks Pelayanan Publik PPOMN	4,06	Nilai Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	57,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB PPOMN	92,00	Nilai Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP PPOMN	84,00	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN PPOMN	77,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Status akreditasi	-	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi PPOMN yang optimal	2,00	Indeks	2,00	100,00
		Nilai Kinerja Anggaran PPOMN	94,15	Nilai	0,00	0,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPOMN	Efisien (91%)	%	75,00	82,42
1.19	Penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	Tingkat Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan	52,00	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase pemenuhan Nilai kinerja penyidikan oleh UPT BPOM	76,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan yang ditindaklanjuti	75,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase perkara yang meningkat tahapan penyelesaiannya dengan adanya dukungan teknis	47,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase pendalaman informasi penyidikan yang berhasil menjadi SPDP	55,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase barang bukti yang selesai ditangani sesuai standar	55,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	89,00	Nilai Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	77,00	Nilai Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang optimal	2,00	Nilai Indeks	0,25	12,50
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Efisien (89%)	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
1.20	Riset dan kajian di bidang obat dan makanan	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	75,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase riset dan kajian yang sesuai dengan perencanaan	100,00	%	100,00	100,00
		Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset dan kajian dan kesesuaian dengan timeline	84,00	%	69,13	82,30
		Nilai kualitas publikasi hasil riset dan kajian	75,00	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	90,00	Nilai Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	84,00	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	77,00	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi PRKOM yang optimal	2,00	Indeks	2,75	137,50
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	94,00	Nilai	53,42	56,83
		Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Efisien (93%)	%	75,00	80,65

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1.21	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	86,70	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase UMKM Kosmetik yang menerima sertifikat CPKB	86,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
1.22	Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber	Persentase hasil patroli siber yang efektif	57,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
2	Program Dukungan Manajemen	Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	43,25	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	Opini	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama	76,73	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	83,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Media	73,5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Opini Publik BPOM	67,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kerjasama yang efektif	84,00	%	21,76	25,90
		Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	10,17	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Evaluasi Internal Akutabilitas Kinerja BPOM	8,28	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Mitra Kerja Inspektorat Utama	3,70	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditolerans	<1	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	90,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
2.1	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan	73,00	%	21,62	29,62
		Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)	2,00	Negara	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerjasama	3,84	Indeks	3,62	94,27
		Jumlah rekomendasi penguatan regulatori yang diterapkan oleh negara penerima KSS Badan POM	2,00	Rekomendasi	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	82,00	%	81,36	99,21
		Jumlah dokumen Kerja Sama Badan POM	84,00	Dokumen	12,00	14,29
		Indeks RB Biro Kerja Sama	89,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama	77,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Kerja Sama	2,00	Indeks	0,25	12,50
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama	Efisien (90%)	%	75,00	83,33
2.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Nilai RB BPOM Penguatan akuntabilitas	5,25	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	76,73	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	94,00	Nilai	0,00	0,00
		Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BPOM	94,87	Nilai	90,43	95,32
		Persentase kesesuaian Laporan Keuangan yang disusun dengan Standara Akuntansi Pemerintahan	100,00	%	25,00	25,00
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	3,80	Indeks	3,42	90,00
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kinerja satker terhadap pedoman	87,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase satker yang memperoleh Nilai kinerja anggaran minimal 95 berdasarkan mekanisme reward dan punishment berdasarkan mekanisme reward and punishment	25,60	%	13,90	54,30
		Persentase dokumen penganggaran yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100,00	%	40,00	40,00
		Persentase unit kerja yang melaporkan capaian kinerja dan anggaran sesuai pedoman	63,00	%	78,53	124,65
		Persentase dokumen monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100,00	%	26,09	26,09
		Persentase satker yang memperoleh Nilai kinerja pelaksanaan anggaran minimal Baik	81,00	%	65,00	80,25
		Persentase dokumen laporan keuangan satker yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100,00	%	25,00	25,00
		Persentase laporan PNPB unit kerja yang disampaikan tepat waktu	96,00	%	94,25	98,18
		Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	89,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	77,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Perencanaan dan Keuangan yang baik	2,00	Indeks	2,50	125,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	Efisien (100%)	Nilai	75,00	75,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
2.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	3,80	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	4,90	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai RB BPOM penataan tata laksana	4,40	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi	3,60	Indeks	3,73	103,61
		Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100,00	%	40,87	40,87
		Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	83,00	%	90,12	108,58
		Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	92,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN	77,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	2,00	%	0,25	12,50
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	Efisien (95%)	Nilai	85,42	89,91
		2.4	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	13,60	Indeks
Nilai Pengelolaan BMN BPOM	82,00			Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum dan SDM	3,73			Indeks	3,41	91,42
Persentase ASN BPOM yang Memiliki Kinerja Berkriteria Minimal Baik	91,00			Indeks	98,60	108,35
Persentase ASN BPOM yang Ditingkatkan Kariernya Sesuai Pedoman Pola Karir	75,00			Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan	87,00			%	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks RB Biro Umum dan SDM	90,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Biro Umum dan SDM	77,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Umum dan SDM yang optimal	2,00	Indeks	0,25	12,50
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum dan SDM	Efisien (100%)	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
2.5	Pengembangan SDM Aparatur Badan POM	Persentase SDM POM yang memenuhi Standar Kompetensi	82,00	%	73,87	90,09
		Jumlah SDM pengawas obat dan makanan yang tersertifikasi sesuai Standar	820,00	SDM	55,00	6,71
		Nilai RB Badan POM Manajemen Perubahan	4,30	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM	45,00	%	19,80	44,00
		Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti	12,00	Kerja Sama	2,00	16,67
		Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	4,40	Nilai	4,57	103,86
		Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi	91,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase realisasi rencana aksi RB Badan POM terkait Manajemen Perubahan	87,00	%	19,00	21,84
		Indeks RB PPSDM POM	90,00	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP PPSDM POM	85,00	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM	77,00	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.	2,00	Indeks	0,50	25,00
		Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM	94,00	Nilai	57,00	60,64

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran PPSDM POM	Efisien (92%)	Nilai	86,00	93,48
2.6	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	Indeks SPBE Badan POM	3,95	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Badan POM	100,00	%	34,48	34,48
		Indeks Kepuasan Layanan TIK	2,90	%	3,27	112,76
		Nilai RB Badan POM Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	5,02	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	100,00	%	97,73	97,73
		Persentase Pemenuhan Bussines Continuity Management	23,00	%	5,00	21,74
		Persentase Kerjasama Sistem TIK yang ditindaklanjuti	100,00	%	10,00	10,00
		Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	55,00	%	38,05	69,19
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	100,00	%	4,00	4,00
		Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100,00	%	30,92	30,92
		Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	91,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	84,00	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	77,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	2,00	Indeks	1,75	87,50
		Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, dan Data	25,00	%	9,98	39,92
		Sertifikasi ISO 27001	1,00	Sertifikat	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	94,00	Nilai	31,23	33,22
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Efisien (89%)	Nilai	90,00	101,12
2.7	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,99	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai rata-rata evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat I	85,00	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM	100,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	80,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi lingkup Inspektorat I	< 1	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	90,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat I	83,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang sesuai standar mutu	100,00	%	100,00	100,00
		Nilai peer review terhadap pengawasan intern Inspektorat I	80,00	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi Pengawasan intern Inspektorat I yang ditindaklanjuti	92,00	%	96,89	105,32
		Persentase pengaduan lingkup Inspektorat I yang ditindaklanjuti dengan tuntas	85,00	%	100,00	117,65
		Indeks RB Inspektorat I	92,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalisme ASN Inspektorat I	86,00	Indeks	72,79	84,64

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I yang Optimal	2,00	Indeks	0,25	12,50
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat I	Efisien (89%)	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
2.8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Nilai RB BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	6,99	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai rata rata evaluasi AKIP mitra kerja inspektorat II	85,00	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mitra kerja Inspektorat II	100,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi lingkup Inspektorat II	< 1	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja inspektorat II	83,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	81,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	100,00	%	100,00	100,00
		Nilai peer review terhadap pengawasan intern Inspektorat II	80,00	Nilai	74,99	93,74
		Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti	92,00	%	89,91	97,73
		Persentase pengaduan lingkup Inspektorat II yang ditindaklanjuti secara tuntas	85,00	%	0,00	0,00
		Persentase temuan audit internal ISO 9001:2015 yang ditindaklanjuti	100,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi hasil monev pelaksanaan RB BPOM yang ditindaklanjuti	100,00	%	0,00	0,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase rekomendasi hasil revidi PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti	100,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi survei integritas organisasi dan jabatan yang ditindaklanjuti	90,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Inspektorat II	92,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama	3,70	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	86,00	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal	2,00	Indeks	0,25	12,50
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat II	Efisien (89%)	%	75,00	84,27
2.9	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Persentase Satker yang Mampu Mengelola BMN dengan Baik	91,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai Standar	80,00	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun

LAMPIRAN I

SERAPAN ANGGARAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2021
SUMBER: APLIKASI OMSPAN
(Per 31 Maret 2021)

A. Unit Pusat

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
1	432731 - SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	386.965.204.000	50.810.359.688	13,13%
1.1	BIRO KERJASAMA	14.318.263.000	969.258.857	6,77%
1.2	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	22.298.642.000	970.438.072	4,35%
1.3	BIRO HUKUM DAN ORGANISASI	14.316.366.000	691.226.805	4,83%
1.4	BIRO UMUM	326.338.963.000	47.471.986.737	14,55%
1.5	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	9.692.970.000	707.449.217	7,30%
2	445155 - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	41.103.943.000	3.430.275.707	8,35%
2.1	DIT. PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	7.647.335.000	698.090.449	9,13%
2.2	DIT. PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU DAN EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	8.769.574.000	622.947.804	7,10%
2.3	DIT. PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR	8.230.939.000	859.311.730	10,44%
2.4	DIT. REGISTRASI OBAT	8.800.000.000	791.475.293	8,99%
2.5	DIT. STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	7.656.095.000	458.450.431	5,99%
3	445161 - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	41.023.718.000	4.042.113.038	9,85%
3.1	DIT. PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN	9.274.111.000	1.491.505.734	16,08%
3.2	DIT. PENGAWASAN KOSMETIK	8.087.950.000	724.371.707	8,96%
3.3	DIT. REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	8.900.772.000	605.644.757	6,80%
3.4	DIT. STANDADISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	5.817.313.000	692.808.274	11,91%
3.5	DIT. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	8.943.572.000	527.782.566	5,90%
4	445170 - DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	51.218.684.000	5.062.837.055	9,88%
4.1	DIT. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN	11.504.640.000	1.361.642.175	11,84%
4.2	DIT. PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN	11.137.261.000	827.791.834	7,43%
4.3	DIT. REGISTRASI PANGAN OLAHAN	8.500.000.000	862.914.476	10,15%
4.4	DIT. STANDRDISASI PANGAN OLAHAN	8.228.258.000	567.523.561	6,90%
4.5	DIT. PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN	11.848.525.000	1.442.965.009	12,18%
5	632437 - DEPUTI BIDANG PENINDAKAN	30.406.163.000	2.013.012.493	6,62%
5.1	DIT. SIBER OBAT DAN MAKANAN	5.653.600.000	151.829.600	2,69%
5.2	DIT. INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN	7.256.620.000	352.289.924	4,85%
5.3	DIT. PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN	7.783.087.000	651.280.070	8,37%
5.4	DIT. CEGAH TANGKAL	9.712.856.000	857.612.899	8,83%
6	INSPEKTORAT UTAMA	22.661.607.000	3.734.839.041	16,48%
6.1	INSPEKTORAT I	17.292.688.000	3.390.886.195	19,61%
6.2	INSPEKTORAT II	5.368.919.000	343.952.846	6,41%
7	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	105.370.538.000	8.902.552.528	8,45%
8	PUSAT RISET DAN KAJIAN OBAT DAN MAKANAN	24.094.757.000	2.445.672.982	10,15%
9	PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	53.525.203.000	3.265.144.957	6,10%
10	PUSAT PENGEMBANGAN SDM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	48.447.825.000	4.953.248.454	10,22%
	TOTAL SATKER PUSAT	804.817.642.000	88.660.055.943	11,02%

B. Balai Besar / Balai POM

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
1	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SOFIFI	15.549.833.000	2.470.894.861	15,89%
2	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	16.012.584.000	1.436.016.136	8,97%
3	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	47.430.798.000	6.736.687.327	14,20%
4	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	57.089.510.000	6.788.091.845	11,89%
5	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	52.306.317.000	7.398.450.505	14,14%
6	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	39.990.978.000	4.876.529.201	12,19%
7	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	50.526.716.000	7.126.605.895	14,10%
8	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	40.091.845.000	4.707.816.382	11,74%
9	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	55.099.562.000	5.570.945.921	10,11%
10	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG	45.920.455.000	6.237.565.473	13,58%
11	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	37.307.372.000	5.854.679.235	15,69%
12	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI	34.660.694.000	4.165.455.183	12,02%
13	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG	35.333.061.000	4.729.233.058	13,38%
14	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	31.818.184.000	4.368.451.408	13,73%
15	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	31.592.258.000	4.675.983.471	14,80%
16	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKARAYA	27.454.272.000	4.372.738.588	15,93%
17	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN	55.781.064.000	4.693.289.717	8,41%
18	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA	47.498.296.000	4.308.879.496	9,07%
19	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	42.208.001.000	5.332.403.110	12,63%
20	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU	33.872.145.000	3.902.613.122	11,52%
21	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	50.528.112.000	6.011.701.925	11,90%
22	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	22.849.992.000	3.074.026.473	13,45%
23	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON	24.482.165.000	3.948.712.690	16,13%
24	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	47.812.779.000	6.260.085.150	13,09%
25	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	30.934.352.000	4.534.430.925	14,66%
26	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KUPANG	32.577.069.000	3.617.346.853	11,10%
27	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	38.204.237.000	4.184.417.183	10,95%
28	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU	31.746.486.000	4.652.578.796	14,66%
29	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG	33.469.811.000	4.434.174.586	13,25%
30	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	30.061.534.000	3.673.348.979	12,22%
31	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO	22.563.586.000	2.381.173.725	10,55%
32	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI	28.069.064.000	2.771.840.996	9,88%
33	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG	24.120.606.000	2.918.875.932	12,10%
	TOTAL SATKER BALAI	1.214.963.738.000	152.216.044.147	12,53%

C. Loka POM Satker Mandiri

NO	SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI	%
1	LOKA POM DI KABUPATEN KEDIRI	3.581.822.000	645.116.523	18,01%
2	LOKA POM DI KABUPATEN JEMBER	3.511.945.000	631.585.549	17,98%
3	LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS	3.814.147.000	759.880.665	19,92%
4	LOKA POM DI KOTA PALOPO	4.327.682.000	595.992.632	13,77%
5	LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR	4.319.500.000	986.654.224	22,84%
6	LOKA POM DI KABUPATEN TANGERANG	4.341.009.000	928.729.144	21,39%
7	LOKA POM DI KOTA TARAKAN	5.473.501.000	891.929.433	16,30%
8	LOKA POM DI KOTA DUMAI	4.425.790.000	884.802.326	19,99%
9	LOKA POM DI KOTA BAUBAU	4.474.841.000	710.212.604	15,87%
10	LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU	3.503.339.000	718.114.330	20,50%
11	LOKA POM DI KABUPATEN MIMIKA	3.907.722.000	805.224.164	20,61%
12	LOKA POM DI KABUPATEN ENDE	4.677.680.000	797.902.952	17,06%
13	LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	4.450.453.000	729.537.382	16,39%
14	LOKA POM DI KOTA SURAKARTA	5.377.366.000	1.047.972.092	19,49%
15	LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA	4.317.035.000	886.726.831	20,54%
	TOTAL SATKER LOKA SATKER MANDIRI	64.503.832.000	12.020.380.851	18,64%
	TOTAL SATKER PUSAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS	2.084.285.212.000	252.896.480.941	12,13%



BADAN POM

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN I TAHUN 2021



Jl. Percetakan Negara
Jakarta Pusat 10560



www.pom.go.id



021 4244691



[@bpom_ri](https://twitter.com/bpom_ri)



halobpom@pom.go.id



[Bpom RI](https://www.facebook.com/Bpom.RI)